

TAJUK RENCANA

Mengedukasi Warga dengan Budaya Disiplin

SETELAH sempat selama 4 hari berturut-turut nihil kasus baru sebagaimana dikemukakan Jubir Ahmad Yurianto (KR, 7/6), tiba-tiba DIY dihadapkan pada kasus baru. Dua kasus positif korona dari pedagang ikan (KR, 8/6) dan kini 9 calon perwira polisi terinfeksi (13/6). Fakta yang menegaskan bila ancaman penyebaran virus jela masih tetap ada, di tengah gaung pemerintah memutuskan tatanan baru mulai Juni 2020.

Ironisnya, di Yogyakarta Sabtu Minggu (6-7/6) Malioboro dan sekitarnya begitu riuh dengan warga terutama pesepeda dan pejalan kaki. Mereka berkerumun, bercengkerama, dengan gembira. Yang memrihatinkan, sebagian besar di antara mereka tidak mengenakan masker. Abai dengan ancaman virus korona yang jelas masih ada.

Munculnya kasus baru menunjukkan jika ancaman penyebarannya pun tetap ada. Menjadi sangat bisa dipahami bila Sri Sultan geram, ketika tidak adanya budaya disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi tatanan baru.

Pelbagai upaya dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus. Di antaranya kini, diberlakukan protokol ketat memasuki Malioboro, *icon* Yogyakarta. Selain zona wajib masker, juga diberlakukan eQR Codef bagi pengunjung. Untuk mendukung semua itu, kini ada razia Tim Gabungan TNI, Polri, Dishub DIY dan Satpol PP (KR, 14/6). Perlu dipahami, tim bukan untuk melarang siapa pun yang hendak masuk ke Malioboro. Hanya karena Malioboro merupakan zona wajib bermasker, siapa pun harus mengikuti ketentuan tersebut.

Masker diwajibkan masker tanpa tujuan. Pengean masker bertujuan menghilangi penyebaran droplet atau percikan, terutama dari mulut dan hidung, sehingga

orang yang memakai masker. Jadi sebetulnya pengean masker melindungi orang lain dari virus yang mungkin kita miliki. Selain itu masker menghalangi masuknya droplet dari luar ke dalam tubuh. Artinya, memberikan tambahan efek perlindungan bagi si pemakai.

Pengean masker di ruang publik, mungkin adalah kebiasaan dan disiplin baru. Kebiasaan baru untuk dijadikan sebagai budaya baru ini tentu harus terus menerus diedukasikan pada warga. Sehingga masyarakat memahami bukan hanya bahaya virus korona. Namun juga ada aturan dan ketentuan berbeda dalam tatanan norma baru.

Sebagaimana pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang juga harus dibudayakan sebagai disiplin baru. Terkait wabah Covid-19, tentu tidak sekadar cuci tangan. Namun juga disiplin bagaimana mengeringkan tangan setelah dicuci, kemana membuang masker sekali pakai, durasi pengean masker dan lainnya. Tentu termasuk bagaimana disiplin mengenakan masker dengan benar dan menjaga jarak. Banyak kita lihat, mengenakan masker tidak sampai menutup hidung atau bahkan dibuka ketika berbicara. Atau mengenakan masker namun abai dengan upaya perlindungan lain seperti tetap berkerumun dan enggan mencuci tangan.

Mau tidak mau, suka tidak suka, pen-disciplinan sebagai usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan menaati sebuah aturan, harus diberlakukan. Budaya disiplin ini menjadi tantangan bersama. Maka mengedukasi warga dengan budaya disiplin, harus terus menerus dilakukan. Karena semua ini proses. Tidak bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. □◻

Pemakzulan Presiden di Negara Demokrasi

Idul Rishan

Dalam logika awam, ada namun merealisasiakannya tidak mudah. Ia harus melewati sebuah proses yang panjang dan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Meskipun alasan pemberhentian itu terpenuhi, pemakzulan merupakan sebuah proses politik. Ia butuh *bargain* dan konsensus. Maklum, yang dikedepankan ialah pertanggungjawaban politiknya.



anggota dan jumlah kehadiran untuk diajukan ke MK. Sungguhpun MK menerima dan memutuskan telah terjadi pelanggaran hukum, putusan MK akan kembali diparipurnakan oleh MPR melalui keputusan politik sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 jumlah anggota dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Mungkin boleh berbeda pendapat. Tetapi penulis berada dalam pandangan bahwa proses itu hampir muskil tercapai. Sebab sistem kepartaian telah menutup probabilitas itu. Dengan sistem multipartai tahapan-tahapan itu menjadi sangat sulit tercapai. Peta politiknya jelas, presiden akan membentuk koalisi yang gemuk untuk menutup kemungkinan tercapainya syarat kuorum dari DPR hingga pada keputusan politik yang akan diparipurnakan oleh MPR.

Oposisi

Saat ini, mungkin hanya PKS dan PAN yang sejauh ini konsisten memainkan peran oposisi. Itupun hanya menguasai 16.4% suara di DPR. Sisanya Partai Demokrat yang memiliki persentase kursi sekitar 9.4%. Sementara 75% kursi dikuasai oleh partai koalisi pemerintah. Relasi Presiden dan DPR *blended* sehingga fungsi pengawasan politik yang dilakukan oleh DPR cenderung tidak objektif bahkan tidak akan pernah objektif.

Wajar, jika isu pemakzulan hanya akan menjadi wacana yang kerap digembosi. Karenanya, meyakini pemakzulan sebagai sebuah rangkaian proses yang sederhana, merupakan hal yang bersifat imajiner. □◻

**) Dr Idul Rishan, Staf Pengajar Departemen HTN, Universitas Islam Indonesia.*

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opinikr@gmail.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Pesan PUS di Masa Normal Baru

DIAKUI atau tidak, pandemi Covid-19 telah mengurangi akses layanan kesehatan reproduksi serta membatasi sosialisasi dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya, Indonesia diperkirakan mengalami lonjakan angka kelahiran pada 2021. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terakhir menggambarkan bahwa dibanding tahun 2019 lalu, telah terjadi penurunan sebanyak 1.179.467 pelayanan KB selama periode Januari-April 2020. Capaian peserta KB Baru juga turun sebanyak 196.524 (12,08 %) dari capaian 2019 lalu yang besarnya 1.823.223 akseptor. Oleh karena itu, masa kenormalan baru seharusnya dimanfaatkan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) untuk segera mendapatkan kembali pelayanan KB.

Kepala BKKBN dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) pada saat Webinar Urgensi Pelayanan KB pada Masa *New Normal*, Selasa (9/6) menegaskan, bahwa KB (baca: Bangkakan) merupakan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang harus kita jaga implementasinya agar berkesinambungan. Apalagi pemerintah sudah berkomitmen mengencarkan kembali Program KB guna menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia bisa tumbuh seimbang. Namun selama masa pandemi terlihat penurunan partisipasi PUS dalam ber-KB yang cukup besar.

Pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan terhadap pelaksanaan Program KB yang selama ini mengandalkan kegiatan tatap muka dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian layanan kontrasepsi. Selama masa pandemi, PUS banyak yang merasa kesulitan untuk mengakses pelayanan KB di klinik pemerintah maupun swasta. Selain itu, bidan atau dokter banyak menutup kliniknya, karena tak memiliki perlengkapan memadai untuk mencegah penularan Covid-19.

Kesadaran PUS untuk ber-KB secara mandiri selama masa pandemi pun masih rendah. BKKBN mengungkap terjadinya penurunan drastis penggunaan kontrasepsi

pada Maret 2020 dibandingkan Februari 2020. Penggunaan berbagai alat kontrasepsi di seluruh Indonesia pada periode itu mengalami penurunan 35 sampai 47 persen, yang bisa berimbas pada meningkatnya jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 15 persen pada 2021.

Peningkatan angka kehamilan apalagi yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah bagi keluarga di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu dan tantangan bagi pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, masa kenormalan baru setelah meredanya pandemi menjadi momentum bagi BKKBN, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk kembali mengencarkan pelaksanaan program KB dengan mendorong bidan dan dokter membuka kembali layanan KB serta mendorong masyarakat tidak ragu mengakses layanan KB dan terus memakai alat kontrasepsi.

PUS di era normal seyogianya bisa merencanakan kehamilan dengan pertimbangan usia, jarak antara kelahiran, jumlah anak dan faktor kesehatan. Pastikan menggunakan alat atau obat kontrasepsi bagi PUS yang menunda kehamilan atau tidak ingin hamil lagi. Jika ada keluhan terkait penggunaan alat atau obat kontrasepsi, perlu segera dikonsultasikan kepada petugas kesehatan melalui telepon atau WA untuk mendapatkan informasi.

Menjaga keberlangsungan program KB merupakan sebuah misi dengan pertarungan yang besar, mengingat selama beberapa dekade ini KB tak hanya berperan sebagai pengendali pertumbuhan penduduk, tapi juga telah berkontribusi dalam menunjang pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan serta menciptakan bonus demografi sebagai salah satu fokus utama Program KB telah menjadi kebutuhan mendasar bagi perempuan. □◻

Drs Mardiyah, Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk Dinas PMD

Daldud dan KB Kabupaten Kulonprogo.

Utopis

Sekalipun indikasi itu ada dan menguat, persebaran norma yang mengatur pemakzulan presiden di dalam UUDN merupakan klausul yang bersifat utopis.

Menyelamatkan Demokrasi Lokal

Aminuddin

RAPAT dengar pendapat , Rabu (27/5) yang diikuti Komisi II, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, KPU, dan DKPP menghasilkan pemahaman tunggal bahwa pilkada akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Selain itu, pelaksanaan pilkada juga akan disesuaikan dengan protokol kesehatan demi mencegah tersebarnya virus korona. Salah satu alasan diselenggarakannya pilkada 2020 adalah surat dari gugus tugas yang menyebutkan bahwa pandemi korona belum bisa dipastikan kapan berakhirnya.

Ada hal penting yakni pemahaman tunggal tersebut alpa dengan keselamatan pemilih. Mengingat hajatan demokrasi lokal dan nasional tidak sekadar menyerahkan suara kepada kontestan. Namun juga terkait dengan keselamatan pemilih. Keselamatan pemilih menjadi urusan paripurna. Dengan menyelamatkan pemilih, itu artinya menyelamatkan demokrasi lokal.

Harga Mati

Ironis! Di Indonesia, menyelamatkan pelaksanaan proses demokrasi jauh lebih penting ketimbang menyelamatkan pemilih. Alasannya pun sederhana, karena sistem politik yang berlaku tidak menjamin akses kekuasaan bagi pemilih. Yang dimaksud dengan akses kekuasaan bagi pemilih adalah kesempatan yang disediakan bagi pemilih untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, baik yang menyangkut calon penjabat publik maupun kebijakan publik. (Surbakti, dkk, 2011).

Mestinya, dalam konteks pandemi saat ini, keselamatan publik menjadi harga mati. Mengingat pilkada yang diselenggarakan di 270 daerah akan melibatkan setidaknya 105.396.460 jiwa. Dengan angka seperti ini, lalu lajang publik bisa dipastikan terjadi, tidak hanya pada proses pemungutan suara. Jauh sebelum itu, keniscayaan bertemunya penyelenggara dan pemilih akan terjadi. Misalnya da-

lam proses verifikasi. Dengan demikian, interaksi dan mobilitas penduduk tidak dapat dihindarkan.

Menyelamatkan proses pemilihan umum memang menjadi dilematis. Di satu sisi, jika pemerintah berani bersikap menunda pilkada hingga 2021, yang terjadi di daerah adalah kekosongan pejabat kepala daerah. Berdasarkan data dari Kementerian dalam negeri, ada 208 daerah yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2021. Sisanya 60 daerah. Masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah berakhir pada Maret-Juli 2021 dan dua daerah masa jabatan pemimpinnya berakhir September 2021.

Mau tidak mau, pemerintah harus menyiapkan anggaran tambahan. Berbagai kebutuhan pelindung diri seperti masker, baju pelindung, sarung tangan, pelindung wajah, hand sanitizer, cairan disinfektan juga harus disiapkan. Otomatis anggaran pun harus dirogoh. Untuk diketahui, tambahan anggaran Pilkada 20-20 yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu berkisar Rp 2,8 triliun - Rp 5,9 triliun.

Dengan kondisi sekarang, yang ditakutkan adalah kapasitas fiskal daerah yang semakin mengkhawatirkan. Menurut indeks kapasitas fiskal daerah dari Kementerian Keuangan, dan 270 daerah yang akan menggelar pilkada 2020, ada 133 daerah masuk kategori rendah dan sangat rendah (49%). Hanya 74 daerah yang termasuk tinggi dan sangat tinggi (27%).

Menyelamatkan Pemilih

Dari pelbagai risiko pembiayaan yang akan timbul jika pelaksanaan pilkada te-

tap dilakukan tahun ini, yang paling dikhawatirkan adalah kualitas pilkada itu sendiri. Bagaimana pun, kondisi pandemi korona akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Proses penyelenggaraan dan pelaksanaan akan terganggu. Panitia merasa was-was atas keselamatan bisa jadi penyelenggaraan tidak akan berjalan maksimal.

Tidak kalah penting lagi adalah memilih tidak hanya kehilangan haknya untuk memilih dengan nyaman, aman dan kondusif. Bahkan memilih juga khawatir untuk datang ke TPS. Mereka tentu akan memikirkan keselamatan dirinya ketimbang bertaruh nyawa hanya untuk menyerahkan suara di bilik suara

Partisipasi pemilih pasti terdampak. Artinya, sangat mungkin partisipasinya menurun signifikan. Itu terjadi karena masyarakat lebih memilih berdiam di rumah. Mereka tidak ingin golput, namun momentum pilkada memaksa mereka untuk berdiam diri dan tidak hadir dalam pemilihan kepala daerah. □◻

Aminuddin, Pemerhati Politik dan Demokrasi, Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pojok KR

Jalan-jalan tak pakai masker, kena razia -- **Kalau malas pakai masker, ya di rumah saja**

Selama pandemi, waspada! KDRT tersembunyi -- **Tanpa wabah saja banyak kasus disebarkan**

Ratusan karyawan industri tekstil dirumahkan -- **Tekanan hidup kian berat**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahad. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Susitwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSh, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).